

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MASA ORDE LAMA (KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM TAHUN 1945-1966)**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD HASAN BAIDLAWIE
1620410041

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Program Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I**

NIM : 1620410041

Jenjang : Magister (S-2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya



Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I

NIM: 1620410041

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I**

NIM : 1620410041

Jenjang : Magister (S-2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2018

Mengetahui,



Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I

NIM: 1620410041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621. 512474 Fax, (0274) 586117
tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor : B-083/Un.02/DT/PP.9/08/2018

Tesis Berjudul : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MASA ORDE
LAMA (KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN
1945-1966)

Nama : Muhammad Hasan Baidlawie

NIM : 1620410041

Program Studi : PAI

Konsentrasi : PAI

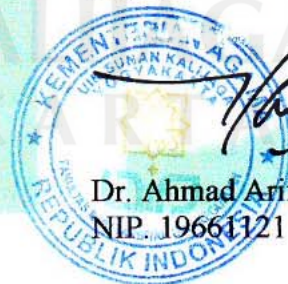
Tanggal Ujian : 12 Juli 2018

Pukul : 11.00 – 12.00 WIB.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Dekan



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag
NIP. 19661121 199203 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
ERA ORDE LAMA (KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM TAHUN 1945-1966)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I

NIM : 1620410041

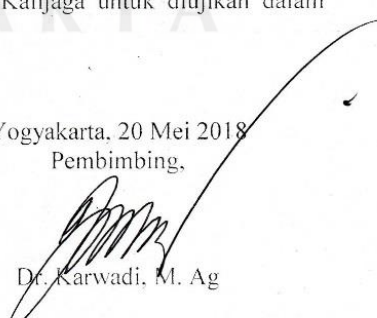
Jenjang : Magister (S-2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya yang berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2018
Pembimbing,


Dr. Karwadi, M. Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ERA ORDE LAMA
(KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 1945-1966)

Nama : Muhammad Hasan Baidlawie

NIM : 1620410041

Program Studi : PAI

Konsentrasi : PAI

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosyah

Ketua/Pembimbing : Dr. Karwadi, M.Ag. ()

Sekretaris/Penguji I : Dr. H. Tasman, M.A. ()

Penguji II : Dr. Eva Latipah, M.Si. ()

Diuji di Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Waktu : 11.00 – 12.00 WIB.

Hasil : B+ (84)

IPK : 3,61

Predikat : Sangat Memuaskan

*coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Muhammad Hasan Baidlawie (1620410041). *Perkembangan pendidikan agama islam Masa Orde Lama (kajian kebijakan pendidikan agama islam tahun 1945-1966)*. Tesis. Yogyakarta : Program Studi Magister Pendidikan Islam konsentrasi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyahdan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan merupakan salah satu bidang kajian politik pendidikan. Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang memiliki fokus kajian tentang kebijakan pemerintah orde lama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Adapun hasil sebagai berikut: Kebijakan pemerintah orde lama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui lahirnya beberapa regulasi tentang pelaksanaan pendidikan nasional maupun yang secara spesifik mencakup pendidikan Islam. Regulasi tersebut antara lain :1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945. 2) Keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. 3) UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. 4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951. 5) Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951. 6) Undang – undang No. 12 Tahun 1954. 7) TAP MPRS No 2 Tahun 1960. Adapun dinamika yang terjadi selama periode ini berlangsung adalah mengupayakan pendidikan agama Islam dapat terselenggara di lembaga-lembaga pendidikan umum serta membenahi fasilitas demi mendukung pendidikan agama Islam. pendidikan agama Islam di sekolah umum belum memenuhi harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang menjadikan agama sebagai benteng moral bangsa. Kondisi ini dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh tiga faktor, yaitu: pertama, sumber daya guru agama Islam; kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam; dan ketiga, kegiatan evaluasi dan pengujian terkait pendidikan agama Islam di sekolah umum. Hal ini juga dipengaruhi kondisi pemerintahan yang tidak stabil. Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960, dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan universitas negeri.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Orde Lama, Kebijakan Pendidikan Agama Islam, Dinamika Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

Muhammad Hasan Baidlawie (1620410041). The development of Islamic education in the old order era (the study of Islamic religious education policy in 1945-1966). Thesis. Yogyakarta: Master of Islamic Education Study Program concentration of Islamic Education Faculty of Tarbiyah Science and Teaching of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Government policy on education is one of the fields of political education studies. The politics of education is all government policies of a country in the field of education in the form of legislation or other contributions to carry out education in order to achieve the goals of the country.

This research is a literature study that has a focus on the study of the old order government policy in the implementation of Islamic education.

The results are as follows: The old order government policy in the implementation of Islamic education can be traced through the birth of several regulations regarding the implementation of national education and specifically covering Islamic education. The regulations include: 1) Decree of the Working Committee of the Central Indonesian National Committee (BPKNIP) on December 27, 1945. 2) Joint Decree between the Minister of PPK and the Minister of Religion No.1142 / Bhg A (teaching), Jakarta on December 2, 1946, No 1285 / K-7 (Religion) Yogyakarta on December 2, 1946. 3) Law No. 4 of 1950 concerning the Basics of Education and Teaching in Schools. 4) Joint Decree (SKB) Minister of Education, Teaching and Culture No. 1432 / Kab. June 20, 1951 and Minister of Religion No. K.1 / 652, dated June 20, 1951. 5) Joint Instruction of the Minister of Education, Culture and Culture No. 17678 / Kab and Minister of Religion No. K.1 / 9180 dated July 16, 1951. 6) Law No. 12 of 1954. 7) TAP MPRS No. 2 of 1960. The dynamics that occurred during this period were to strive for Islamic religious education in public education institutions and to improve facilities to support Islamic religious education. Islamic religious education in public schools has not fulfilled expectations in improving the quality of Islamic religious education which makes religion a national stronghold. This condition is influenced by at least three factors, namely: first, the resources of the Islamic religion teacher; second, the implementation of Islamic religious education; and third, evaluation and testing activities related to Islamic religious education in public schools. This is also influenced by unstable government conditions. The decision to give religious studies at school starting in grade IV continues to develop and undergoes a series of policy changes. In 1960, it was stated that religious education became a lesson in schools ranging from elementary to state universities.

Keywords: Islamic Education, Old Order, Policy of Islamic Religion Education, Dynamics of Islamic Education

M O T T O

“Saya berkata saya cinta Islam dan saya ingin menjadi orang Islam terbaik. Saya cinta Islam oleh karena menurut pendapat saya, Islam itu bukan agama yang beku. Islam suatu agama yang bisa mengikuti zaman. Zaman adalah dinamis, zaman tidak statis. Oleh karena zaman itu tidak beku, Islam itu pun tidak beku dan selalu bisa mengikuti zaman.”¹

Bung Karno

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Mochamad Nur Arifin, *Bung Karno Menerjemahkan Al-Qur'an*, hlm. 28



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Almamaterku

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian tentang Perkembangan Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama (Kajian Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1945-1966). Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sekaligus dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis.

5. Segenap dosen dan karyawan Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Haryanto dan Ibunda Yunidawati, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan do'a terbaiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau berdua.
7. Rekan-rekan seperjuangan S2 (PAI A 01).
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang kalian lakukan diterima disisi Allah SWT, dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, *Amin*.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt., dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Penulis

Muhammad Hasan Baidlawie, S.Pd.I.
NIM. 1620410041

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Pembahasan.....	44

BAB II : PROSES TERBENTUKNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA ORDE LAMA

A. Proses Terbentuknya Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Kemerdekaan (1945-1949)	45
B. Proses Terbentuknya Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)	56
C. Proses Terbentuknya Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1966).....	65

BAB III : KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MASA ORDE LAMA	
A. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama.....	69
1. Penerapan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1945-1949	69
2. Penerapan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1950-1959	79
3. Penerapan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Tahun 1960-1966	96
B. Dinamika Perkembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama (1945-1966).....	103
1. Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Pasca Kemerdekaan (1945-1949)	104
2. Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959).....	107
3. Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1966)	112
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA	119
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.¹ Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.² Usaha pendidikan ini sendiri ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa dan karsa yang bertujuan agar manusia mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Pendidikan Agama merupakan salah satu dari tiga subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.³ Pendidikan Agama Islam juga berperan dalam memberikan dasar keagamaan yang kuat terhadap seorang muslim dan muslimah. Sebagai salah satu negara yang menempatkan agama sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran Pendidikan

¹ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Agama Islam : Membangun masyarakat madani Indonesia* (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003), hlm. 4

² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.

1

³ Chabib Thoba, dkk, *Metodologi Pelajaran Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1

Agama Islam ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar keagamaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Pendidikan Agama Islam sendiri sejatinya sudah ada semenjak abad ke-7 sudah ada di Indonesia seiring dengan masuknya Agama Islam itu sendiri. Akan tetapi baru pada saat pasca kemerdekaan pendidikan Agama Islam mendapat pengakuan secara nasional. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka diperlukan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu Bangsa yang merdeka dan Negara yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang merdeka itulah maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam Landasan Idieloginya, tujuan Pendidikan, Sistem Persekolahan dan Kesempatan Belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia sebagai tertera dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijadikan Landasan Idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945 – 1950 negara kita mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Karena itulah Parncasila mantap, menjadi landasan idiil pendidikan di Indonesia.⁴ Pendidikan Agama Islam untuk umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu

⁴ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan penidikan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 32

pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pancasila sebagai landasan ideologis dalam pembangunan bangsa mengandung arti bahwa setiap usaha pembangunan dan pengembangan bangsa Indonesia, harus selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia Indonesia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dan dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniyah. Untuk itu maka, bangsa Indonesia harus dapat menghayati cita-cita dan dasar hidup kebangsaannya secara terus menerus, dapat mengamalkan dan mewujudkan cita-cita dan dasar hidup tersebut secara nyata, dan melestarikannya dengan mewariskan nilai-nilai moral idiologi, tata nilai budaya, nilai-nilai moral keagamaan yang menjadi sumber aspirasi yang tak ternilai harganya dalam pembangunan bangsa dan tanah air. Oleh karena itulah, maka pengembangan bangsa merupakan kriteria dasar dalam membangun satu sistem pendidikan nasional dengan mewujudkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara aspek lahiriah dan aspek rohaniah.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan merupakan salah satu bidang kajian politik pendidikan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan khususnya dalam perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang mengikutinya tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kepentingan, baik yang berkaitan kepentingan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu

pendidikan, maupun kepentingan ideologi, kepentingan politik, dan kepentingan ekonomi. Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.⁵

Pemerintahan pada masa orde lama yang dimaksudkan kepada rentang waktu 1945 sampai 1966 diberi sebuah tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Secara khusus pendidikan Islam bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi ke Islaman dalam arti yang seharusnya. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi : pendidikan Islam sebagai sebuah mata pelajaran yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Kehadiran Negara akan keberlangsungan hidup rakyat juga termaktub dalam pendidikan sebagai salah satu yang terpenting mendidik generasi bangsa, keinginan akan terciptanya kehidupan masyarakat yang jauh akan ke-Jahiliyahan. Kondisi pendidikan kita saat ini terkena arus arus globalisasi yang menciptakan kompetisi untuk umat manusia. Hal materiil sebagai sebuah tuntutan di arena yang di sebut globalisasi membawa kita kepada ketiadaan akan kemanusiaan. Tentu hal ini berbeda jauh akan pengertian pendidikan menurut Paulo Freire bahwa pendidikan haruslah memanusiakan manusia, sisi kemanusiaan seperti saling bergotong royong, menghormati perbedaan, tidak saling membunuh

⁵ Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), hlm. 9

satu sama lain. Bentuk pendidikan seperti yang di sebutkan tadi, harusnya di mulai atau di tradisikan dalam sistem pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia, sama nasibnya. dan secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional

Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Pendidikan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling jalin faktor-faktor ekonomi, politik bahkan pertahanan keamanan. Maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial, betapapun diklaim bahwa warga kampus/sekolah memiliki keunikannya sendiri sebagai bagian dari komunitas-komunitas yang nantinya akan melahirkan manusia-manusia intelektual. Oleh karena itu dalam membuat sebuah kebijakan, harus mempertimbangkan keseluruhan potensi dari sumber daya yang ada baik secara kebudayaan maupun secara kodrati yang melekat, hidup dan berkembang di sekitan habitan kehidupan manusia, tempat dimana kebijakan tersebut akan di jalankan. Melihat fenomena kebijakan pendidikan yang di jalan kan oleh pemerintahan saat ini masih belum bisa di bilang ideal, baik secara konsep maupun implementasinya di masyarakat. Program-program yang di lakukan oleh

pemerintah masih bersifat sektoral dan reaksional. Bersifat sektoral yang di maksud adalah tidak semua daerah dan wilayah di negara ini menjalankan apa yang telah di putuskan oleh pemerintah pusat dapat dan bisa di jalankan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena faktanya dilapangan, masih banyak kebijakan tersebut enggan bahkan tidak di jalan kan. Hal ini di karenakan dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak melihat kharakteristik permasalahan yang ada di setiap daerah. Disamping kendala geografis dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Persoalan kedua adalah, sifat program yang di ambil atau di jalan kan saat ini adalah program/kebijakan yang bersifat reaksional. Karena hampir semua program hanya di maksudkan untuk mengatasi permasalahan yang bersifat sementara dan berskala kecil. Selain itu kebijakan yang di terapkan atau di laksanakan bertujuan untuk meredam permasalahan yang timbul akibat dari penyimpangan kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Karena sekali langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan dari tingkat satuan sampai nasional. Agar dampak negatif dapat dikurangi maka dapt diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses kebijakan pendidikan dengan memahami secara mendalam hakikat kebijakan pendidikan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang proses perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama (kajian kebijakan Pendidikan Agama Islam tahun 1945-1966). Maka dari itu, secara eksplisit dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama tahun 1945-1966?
2. Bagaimana dinamika kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama tahun 1945-1966?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama tahun 1945-1966
 - b. Untuk mengetahui dinamika kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama tahun 1945-1966
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai bahan kajian dan tindak lanjut bagi para pakar atau pemerhati pendidikan dalam pengembangan keilmuannya.
 - b. Memperkaya wawasan ilmiah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dilakukan untuk mengetahui dimana perbedaan penelitian ini diantara penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan mendasarkan

pada literatur yang berkaitan dengan penelitian sejarah Pendidikan Agama Islam masa orde lama.

Pertama Fauzan, dalam tesisnya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia : Suatu analisis kebijakan dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru*⁶. Penelitiannya mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru tentang persoalan kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan persoalan anggaran yang dilihat dari sisi historis dan manajemen yang terjadi pada masa itu. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah Orde Lama dan Orde Baru mampu menciptakan PTAIN yang lebih inklusif atau eksklusif. Hasil penelitiannya adalah ia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Lama dan Orde Baru sangat berpengaruh terhadap proses penciptaan kondisi PTAIN yang lebih inklusif, terbuka, dan lebih memberi peluang kepada para lulusan perguruan tinggi ini.

Kedua Penelitian oleh Abdul Karim Lubis dalam tesisnya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi : Studi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003*⁷. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemerintah, apa tujuan pemerintah, dan apa implikasinya pemerintah mengakomodasi lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Ia membatasi pendidikan Islam sebagai lembaga yaitu

⁶ Fauzan, *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia : Suatu analisis kebijakan dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru*. Tesis : (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

⁷ Abdul Karim Lubis, *Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Era Reformasi : Studi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003*. Tesis : (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Hasil penelitiannya adalah ia menemukan bahwa kebijakan politik pendidikan pemerintah era reformasi mengakomodasi lembaga-lembaga pendidikan Islam cenderung murni berasal dari keputusan politik pemerintah itu sendiri, tanpa ada lobi-lobi, intervensi dan desakan dari eksternal. Lalu implikasinya adalah diposisikan madrasah (sekolah umum berciri khas Islam) sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan nasional dan diintegrasikannya pendidikan diniyah dan pondok pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga Skripsi Esti Purnami Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul *Pendidikan Islam Berbasis Nasionalisme (Telaah Kritis Konsep Nasionalisme Soekarno*⁸. Skripsi ini meneliti tentang konsep dan gagasan nasionalisme Soekarno, sehingga pemahaman tentang nasionalisme sebagai roh dari pada persatuan bangsa ini bisa terwujud kembali, kemudian dalam latar belakang juga mengupas tentang berbagai macam persoalan pendidikan dari mulai proses disintegrasinya sebuah bangsa, hingga pemecahan dari (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI bahwa hegemoni dari sebuah pepecahan sebagai kesatuan, dengan itu konsep nasionalisme yang dicanangkan Soekarno merupakan konsep yang tidak mengutamakan kepentingan individu, tetapi lebih mengedepankan konsep sebagai pemersatu dari sebuah bangsa dan negara. Sehingga basis-basis dari pada

⁸ Esti Purnami, *Pendidikan Islam Berbasis Nasionalisme (Telaah Kritis Konsep Nasionalisme Soekarno*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011

pemahaman nasionalisme yaitu akar budaya serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.

Keempat Muhammad Said Asy'ari yang berupa tesis dengan judul *Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pengembangan Kurikulum di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogari Pasuruan*⁹. Dalam penelitiannya ini Asy'ari menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum madrasah Miftahul Ulum dapat dikatakan telah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan baik. Disana sangat memperhatikan masyarakat maupun muridnya sehingga status muadalah memang berhak untuk disandang oleh madrasah miftahul ulum sidogiri pasuruan. Adanya desentralisasi yang menjadi salah satu tumpuan pelaksanaan tidak disia-siakan dengan merumuskan dan mengembangkan kurikulum secara mandiri.

Kelima skripsi Dewi Juwita yang berjudul *Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam Indonesia Tahun 1889-1942*¹⁰. Dalam latar belakangnya penulis mengupas sedikit tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan agama. Dalam isinya, dibahas tentang berbagai pergolakan dan reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia-Belanda, termasuk dari kalangan modern, tradisional dan nasionalis. Dalam isinya juga menjelaskan kaum

⁹ Muhammad Said Asy'ari, *Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pengembangan Kurikulum di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogari Pasuruan*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2011)

¹⁰ Dewi Juwita, *Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam Indonesia Tahun 1889-1942*, Skripsi Fakultas Adab (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

nasionalis Islam menyatukan diri dalam satu ideologi Islam untuk menghadapi politik pecah belah (adu domba) belanda.

Dengan melihat dan menelaah pustaka yang sudah ada, maka penulis disini bermaksud untuk mengangkat tentang Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama (kajian kebijakan Pendidikan Agama Islam tahun 1945-1966) yang mana akan difokuskan pada bagaimana bentuk kebijakan Pendidikan Agama Islam pada tahun 1945-1966, lalu bagaimana dinamika Pendidikan Agama Islam pada saat itu. Yang mana perbedaannya terletak bahwa penulis mencoba mengkaji mengenai penarikan kebijakan agama pada masa orde lama sehingga dapat merumuskan tujuan pendidikan pada saat itu serta dinamika-dinamika yang terjadi terhadap kebijakan tersebut

E. Kerangka Teori

1. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.¹¹ Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.¹² Usaha pendidikan ini sendiri ditujukan untuk

¹¹ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Agama Islam : Membangun masyarakat madani Indonesia* (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003), hlm. 4

¹² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.

mengembangkan cipta, rasa dan karsa yang bertujuan agar manusia mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Menurut J. Adler mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistic dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik.¹³

Sementara Muzayyin Arifin menyimpulkan bahwa pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan dari dalam diri manusia menjadi suatu kegiatan hidup yang berhubungan dengan Tuhan (Penciptanya), baik kegiatan itu bersifat pribadi maupun kegiatan sosial.¹⁴ Jadi pendidikan sendiri adalah proses memperbaiki diri seseorang yang dibantu oleh seorang pendidik dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain pendidikan mencoba mengoptimalkan kemampuan seorang individu dalam setiap kegiatan baik yang bersifat pribadi maupun sosial.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

¹³ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵

Pendidikan juga merupakan suatu amanat dari Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di tinjau dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan Negara Indonesia. Pendidikan merupakan elemen dasar dari pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

¹⁵ Undang Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003: UU RI No 20 Tahun 2003

Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam sendiri menurut M. Arifin adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.¹⁶ Sementara menurut Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Agama Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*).¹⁷

Dengan demikian pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk membentuk kepribadian yang utama yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan ukuran Islam. Pendidikan ini harus mampu membimbing, mendidik dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam terhadap murid baik mengenai jasmani maupun rohaninya, agar jasmani dan rohani tumbuh dan berkembang secara selaras.

b. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum adalah suatu alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan. Salah satu rumusan mengajukan konsep bahwa

¹⁶ Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 16

¹⁷ Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Ciputat Press, 1995), hlm. 32

kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik yang dilaksanakan dalam lingkungan sekolah (lembaga pendidikan) maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.¹⁸ Dalam Ilmu pendidikan Islam, kurikulum merupakan komponen yang amat penting karena merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diproses dalam sistem kependidikan Islam. Ia juga menjadi salah satu bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat pencapaian tujuan (input instrumental) pendidikan Islam.¹⁹

Orientasi kurikulum sebagai bahan ajar (*subject matter*) merupakan gambaran dari suatu kurikulum sebagai bahan untuk membentuk kerangka isi materi (*contents*) untuk disampaikan dan dilatih kepada siswa. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai acuan untuk menentukan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah direncanakan dan ditetapkan.²⁰ Kurikulum juga sebagai seperangkat pengalaman, merupakan gambaran bahwa kurikulum yang disusun dapat memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan pembelajaran atas dasar pengalaman mereka (*learning by experiences*). Melalui pengalaman-pengalaman, siswa akan dapat memperoleh banyak bentuk belajar dan dalam

¹⁸ Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung : PT. Trigenda Karya, 1993), hlm. 15

¹⁹ Nur Uhbiyati, Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm. 191.

²⁰ Zurinal Z, *Ilmu Pendidikan, Pengantar dan Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 87

hal ini guru memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman siswa tersebut.²¹

Dalam konteks ini, kurikulum ditujukan sebagai seperangkat alat guna mencapai tujuan pendidikan baik itu pendidikan nasional maupun pendidikan agama islam. Kurikulum juga dianggap sebagai sebuah alat reproduksi budaya yang merupakan gambaran bahwa kurikulum hendaknya dapat memuat isi Al-Qur'an yang mencakup seluruh dimensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan pancaindra dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan bagi manusia, motivasi agar manusia menggunakan akalnyanya, dan motivasi agar manusia menggunakan hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan Ilahiyah.

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Hakekat Pendidikan Agama Islam adalah “usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.”²² Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang

²¹ *Ibid*, hlm. 88

²² M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Agama Islam Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 32.

beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”²³

Pendidikan Agama Islam menurut Hujair A.H Sanaky sendiri Pendidikan Agama Islam harus mampu mengakomodasi berbagai pandangan secara selektif sehingga ada hubungan dalam berbagai konsep, seperti²⁴ :

1. Pendidikan harus membangun kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek. Pendidikan harus bekerjasama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang kritis dan berkualitas. Pendidikan sendiri seharusnya sebagai suatu sistem yang terbuka dan membuat interaksi dengan masyarakat.
2. Pendidikan merupakan tempat pemberdayaan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada. Seperti pesantren, keluarga serta berbagai wadah lembaga yang dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik.
3. Prinsip perencanaan pendidikan, selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
4. Prinsip pendidikan sendiri berorientasikan pada peserta didik, artinya segala kebutuhan peserta didik harus dipenuhi guna mencapai keberhasilan.

Abuddin Nata²⁵ mengungkapkan tujuan pendidikan Islam memiliki tujuan yang mendasar dan strategis. Dikatakan mendasar, karena melalui ilmu

²³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 78

²⁴ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Agama Islam : Membangun masyarakat madani Indonesia* (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003), hlm. 4

²⁵ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.22

pendidikan Islam dapat ditemukan teori, konsep dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam merumuskan berbagai komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar dan seterusnya. Dan dikatakan strategis karena dengan ilmu pendidikan Islam, proses pendidikan akan berjalan secara sistematis dan efektif dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dalam segala aspeknya: pengetahuan, wawasan, keterampilan mental spiritual, akhlak dan kepribadiannya. Sementara itu Harun Nasution yang dikutip oleh Syahidin mengartikan tujuan PAI (secara khusus di sekolah umum) adalah untuk membentuk manusia taqwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, meski mata pelajaran agama tidak diganti mata pelajaran akhlak dan etika.²⁶

Tujuan Pendidikan Agama Islam pada intinya adalah berupaya membangun dan mengembangkan manusia dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia bertakwa dan beriman, berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan professional, beramal shaleh, berkepribadian, bermoral anggun dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kompetitif dan kooperatif dalam era global dan berfikir lokal dalam rangka memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan *duniawiyah* dan

²⁶ Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, (Tasikmalaya : Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005), hlm. 20

ukhrawiyah. Hujair A.H Sanaky menyimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam yang dimaksud meliputi aspek *ilahiyyah* (teosentris), jasmaniah, intelektual, kebebasan, mental, akhlak, professional, karya (*amaliyah*) dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya dan ber peradaban, cerdas, cakap, terampil, berkualitas, dinamis, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab sebagai “*insan kamil*” dalam kehidupannya.²⁷

Dengan demikian, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah mengarahkan kepada hal-hal dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah sehingga akan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sesuatu yang menjadi larangan-Nya. Melaksanakan moralitas Islami yang di teladani dari tingkah laku kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tujuan Pendidikan Agama Islam selain berorientasi kepada kehidupan akhirat juga berorientasi kepada kehidupan dunia yaitu membentuk manusia-manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi makhluk yang lain.

2. Orde Lama

a. Pengertian Orde Lama

Orde lama merupakan istilah untuk menyebut zaman kepemimpinan Soekarno yang dimulai pada tahun 1945 sampai beliau digantikan oleh Soeharto

²⁷ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Agama Islam* ..., hlm. 297

melalui surat perintah 11 Maret 1965.²⁸ Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh-tokoh Indonesia mulai berusaha untuk memperbaiki segala bentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk diskriminasi pun dihapuskan sesuai dengan yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan....”²⁹ dan semua warga negara Indonesia mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala bidang.

Dinamika mengenai sebuah ideologi sering terjadi di Indonesia. Ideologi-ideologi itu muncul sejak zaman pergerakan dan bahkan terus berkembang pasca Indonesia merdeka. Sosialisme, Marxisme, Komunisme, Nasionalisme, Islamisme, Marhaenisme dan Pancasila merupakan beberapa ideologi yang berkembang. Penentuan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia pada saat itu sangatlah vital demi menjadi dasar negara. Rivalitas yang biasanya sering terjadi yaitu antara aliran Nasionalis, Islamis dan Marxis seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Namun akhirnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.³⁰

Ada tiga pandangan berbeda tentang tanggal yang berkaitan dengan periode Orde Lama, yaitu periode kekuasaan personal Soekarno. Pandangan

²⁸ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hlm. 313

²⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4

³⁰ Daniel Dhakidae, dkk, *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, (Jakarta : Kompas, 2013), hlm 34

pertama, dikemukakan oleh Mahfud MD, periode Orde Lama bermula ketika Soekarno mengumumkan Dekrit Presidennya pada tanggal 5 Juli 1959 yang memerintahkan: (1) pembubaran konstituante; (2) berlakunya kembali UUD 1945; (3) tidak berlakunya UUDS 1950; dan (4) dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, Orde Lama tamat ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresidenan dari tangan Soekarno pada tahun 1966.³¹

Pandangan *kedua*, dikemukakan Wiliam Liddle, Orde Lama berawal pada tahun 1950 dan berakhir di tahun 1965. Rentang waktu sepanjang lima belas tahun ini dibagi menjadi satu periode Demokrasi Parlementer (1950-1957), dan satu periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Tetapi Liddle sepakat dengan Mahfud bahwa pada periode akhirnya Orde Lama menjadi rezim otoriter. Liddle merujuk pada Lev, berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin efektif dimulai pada tahun 1957 dan berakhir pada tahun 1965. Menurut Lev sendiri, 1957 adalah tahun terbentuknya Demokrasi Terpimpin. Ketika Soekarno menyatakan berlakunya keadaan darurat dengan “keadaan perang dan siaga” yang menetapkan seluruh wilayah Indonesia sedang berperang dan dalam keadaan darurat, sehingga militerlah yang memegang otoritas utama. Pernyataan keadaan darurat perang ini “menandai tamatnya demokrasi liberal”.³²

³¹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung : Mizan, 2007), hlm. 137

³² *Ibid.*, hlm 138

Pandangan *ketiga*, dikemukakan oleh Lindsey, bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1945 dan berakhir di tahun 1966. Rentang waktu ini mencakup tiga periode kepresidenan Soekarno. Lindsey memandang bahwa periode pertama Orde Lama (1945-1950) adalah masa perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Kemudian Indonesia mengalami Demokrasi Parleментар (1950-1957), dan pemerintahan presidensial dari tahun 1957 hingga 1965. Lindsey juga sepakat bahwa pada rentang waktu terakhir itulah Soekarno menjelma menjadi pengendali sistem hukum Indonesia dan membangun rezim otoriter. Senada dengan Lindsey, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa konsep Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin adalah sebuah “rumusan baru yang berisi bentuk pemerintahan yang lebih otoriter”. Michael J. Vatikiotis juga berargumen bahwa dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin, Soekarno membungkus dirinya dalam “perangkap-perangkap kekuasaan”.³³

Walaupun ketiganya memiliki pendapat yang berbeda mengenai kapan pastinya Orde Lama dimulai, mereka sepakat bahwa jabatan kepresidenan Soekarno pada tahun 1950-an jauh lebih demokratis. Mereka pun sepakat bahwa setelah periode Demokrasi Parleментар, kepemimpinan Soekarno menjadi lebih otoriter ketimbang periode lain sepanjang masa kekuasaannya.

3. Kebijakan Pendidikan

a. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

1) Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial)

³³ *Ibid.*

Sosial demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijaksanaan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan *social demand* sebenarnya tidak sematamata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

2) Pendekatan *Man-Power Approach*

Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan 12 ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional

dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. *Man-power approach* kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan *man-power* ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang.³⁴

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut³⁵. Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam

³⁴ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2009), hlm. 114-118

³⁵ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36

persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.³⁶

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.³⁷ Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan.³⁸

b. Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm. 37

³⁸ Arif Rohman, *Politik Ideologi*.... hlm. 114

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman³⁹ :

- 1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- 2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.
- 4) Keterbukaan (*openness*). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
- 5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat

³⁹ *Ibid*, hlm. 120

diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.

- 6) Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
- 7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- 8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- 9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.

- 10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.
- 11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
- 12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan

pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

- 13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak dari segala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didik atau kemerdekaan peserta didik.⁴⁰

c. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

⁴⁰ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hlm. 141-153

b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.⁴¹

d. Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi

⁴¹ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia : Proses Produk Dan Masa Depan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 20

kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson dalam bukunya Abdul Wahab, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu :

- a. Siapa yang mengimplementasikan
- b. Hakekat dari proses administrasi
- c. Kepatuhan, dan
- d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi, antara lain model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan.

4. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot

pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.⁴²

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.⁴³

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman

⁴² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Alfabeta : Bandung, 2005), hlm. 3

⁴³ *Ibid*, hlm. 4

bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Aminullah⁴⁴ menyatakan bahwa:

“kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh”.

Telah banyak upaya untuk mendefinisikan kebijakan publik secara tegas dan jelas, namun pengertiannya tetap saja menyentuh wilayah-wilayah yang seringkali tumpah-tindih, ambigu, dan luas. Beberapa kalangan mendefinisikan kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sebagian lagi, mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman, acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar atau *roadmap* pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Tulisan ini mengambil posisi bahwa setiap perundangundangan adalah kebijakan, namun tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Hongwood dan Gunn dalam Edi Suharto⁴⁵ menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasiorganisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dll) dan lembaga-lembaga *volunteer* lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 37

Namun, kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena tidak dapat memakai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana lembaga pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat dan berhak menggunakan uang dari pajak tersebut untuk mendanai kegiatan pembangunan. Hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, Karang Taruna atau kelompok-kelompok arisan. Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. Keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang.

Kadang-kadang, kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk

dalam bidang kebijakan publik. Sebagai contoh, kebijakan sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan. Kebijakan sosial secara khusus sejatinya adalah kebijakan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan menunjuk pada proses mensejahterakan manusia atau aktivitas untuk mencapai kondisi sejahtera. Di sini, istilah 'kesejahteraan' tidak menggunakan kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga tidak pakai *embel-embel* 'sosial' atau 'manusia'.

Selain di Indonesia kata sosial mempunyai terlalu banyak arti dan karenanya sering disalahfahami, di negara lain istilah yang banyak digunakan untuk menjelaskan 'bidang sosial' secara spesifik ini adalah '*welfare*' (kesejahteraan) yang umumnya menerangkan berbagai sistem pelayanan sosial dan skema jaminan sosial bagi kelompok yang tidak beruntung. Oleh karena itu, istilah 'pembangunan kesejahteraan sosial' sesungguhnya cukup disebut 'pembangunan kesejahteraan'. Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (*grand design*) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

Kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam suatu rantai pilihan-pilihan yang meliputi analisis, implementasi, evaluasi dan reconsiderasi (pertimbangan kembali). Koordinasi ini hanya dimungkinkan jika tujuantujuan kebijakan dinyatakan secara jelas dan terukur. Manakala tujuan-tujuan kebijakan

tidak jelas atau berlawanan satu sama lain, kebijakan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berhasil. Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan. Penerapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan seringkali kehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali dipandang lebih penting daripada masalah. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya dimana sebuah solusi yang baik akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah.⁴⁶

Identifikasi masalah dan kebutuhan (*needs assessment*) menjadi sangat penting. Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Aktivitas kebijakan sangat cepat bergerak. Setelah keputusan dibuat, kegiatan-kegiatan untuk menerapkan keputusan tersebut harus segera dipersiapkan. Waktu dan kewenangan yang tersedia guna mendukung arah yang dipilih umumnya sangat terbatas dan karenanya menuntut penyesuaian. Pilihan-pilihan kebijakan yang telah dipilih tidak menutup kemungkinan menjadi sedikit berbeda dengan pilihan-pilihan sebelumnya. Tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan juga biasanya sedikit melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi di luar perkiraan. Akibat sampingan (*side effects*) atau yang dikenal dengan istilah *externalities* atau *spillovers* ini hanya bisa diketahui setelah kebijakan diterapkan. Selain mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, *externalities* tentu saja ‘menggangu’ hasil-hasil kebijakan yang telah ditetapkan dan bahkan tidak jarang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 53

menciptakan masalah-masalah baru yang lebih kompleks. Sebuah skema pemberian lisensi pada kegiatan tertentu, seperti pembentukan skema asuransi sosial atau pemberian kredit mikro bagi rakyat miskin, biasanya mengancam elit tertentu atau kelompok *status quo* yang kemungkinan terganggu oleh kebijakan baru. Secara politis mereka berupaya menghambat atau merubah kebijakan baru itu yang dipandang menguntungkan atau minimal tidak mengganggu kepentingan mereka.⁴⁷

Kebijakan diperlukan oleh kebijakan pendidikan agama sebagai penegak eksistensi dogmatic. Kebijakan pendidikan agama dibutuhkan sebagai penegak eksistensi struktural. Adapun kebijakan politik diperlukan sebagai peletak dan penegak dasar yuridis. Negara memberikan kesempatan dalam menjalankan sistem pendidikan baik pendidikan nasional maupun pendidikan agama. Penyelenggara memberikan hak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kebijakan pendidikan sendiri berangkat dari teori-teori pendidikan sementara kebijakan agama berasal dari doktrin-doktrin mengenai agama tersebut. Tentu saja dalam membuat kebijakan tersebut baik kebijakan pendidikan nasional maupun kebijakan pendidikan agama harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di publik dan kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menjalankan proses pembelajaran.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 12

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena di masyarakat,⁴⁸ dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang fokus pada perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama (kajian kebijakan Pendidikan Agama Islam tahun 1945-1966). Karena dalam penelitian ini berusaha mengumpulkan data dan menganalisa tentang perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama.

Dengan demikian, karena penelitian ini masuk pada kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,⁴⁹ catatan-catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu,⁵⁰ maka Peneliti dalam hal ini mengumpulkan dan menggali data-data yang diperoleh dari sumber buku, catatan-catatan, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah dan sumber-sumber lain yang relevan dan dapat menunjang dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya untuk mengumpulkan data guna menggambarkan atau menjelaskan apa adanya

⁴⁸Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 47

⁴⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

⁵⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), hlm. 11

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu⁵¹ kemudian menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti akan berupaya untuk menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis atas bentuk pendidikan terutama perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama dengan menggunakan pendekatan atau teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian maka dalam konteks penelitian ini peneliti bermaksud menggunakan pendekatan *Historis*. Menurut Hasan Usman *history* atau *tarikh* adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temannya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu.⁵² Melalui pendekatan sejarah seseorang akan diajak melihat dari segi kesadaran sosial pada perilaku atau pendukung suatu peristiwa sejarah sehingga mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menentukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Dalam menggunakan data *historis* maka akan dapat menyajikan secara detail dari situasi sejarah.⁵³ Dengan pendekatan *historis* ini diharapkan mampu memahami nilai-nilai sejarah. Sehingga terbentuk manusia

⁵¹Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan; ...*, hlm. 59-60

⁵²Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 46

⁵³Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 105

yang sadar akan historisitas keberadaan Islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah.⁵⁴ Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan metode dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.⁵⁵ Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁵⁶ atau dengan kata lain yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵⁷

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data primer yang mengacu kepada Undang-Undang, peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan

⁵⁴ Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati. 2013. *Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga. h.27.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 172

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 137

⁵⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-22 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39

pendidikan agama Islam pada masa orde lama, yaitu : (1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945. (2) Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. (3) UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. (4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951. (5) Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951. (6) Undang – undang No. 12 Tahun 1954 dan (7) TAP MPRS No 2 Tahun 1960.

Disamping data primer terdapat data sekunder yang sering juga dibutuhkan oleh seorang peneliti. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku atau sumber lainnya yang relevan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Sumber skunder yaitu buku-buku yang terkait dengan perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa orde lama diantaranya buku Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Agama Islam*, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Somarsono Moestoko, *Sejarah Pendidikan dari jaman*

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 137

kejaman, Departemen Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Maksud pokok dari analisis data adalah untuk melakukan pemeriksaan konseptual atas makna yang terkandung dalam *content* data, dan berbagai istilah-istilah yang digunakan. Disini dibutuhkan kejelian dan ketelatenan dalam membaca dan mengolah data. Dalam menganalisis data, peneliti berusaha menggunakan beberapa metode :

- a. Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang telah ada.⁵⁹ Pada deskriptif analisis ini peneliti setelah membaca dan mempelajari data peneliti membuat rancangan organisasional kemudian dikembangkan dari kategori-kategori dari data-data yang diperoleh, dipahami, kemudian dari sini akan ditemukan deskripsi baru.
- b. Analisis isi (*content analysis*), sebuah analisis yang berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.⁶⁰

⁵⁹Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 54

⁶⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, cet ke-2 (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002), hlm. 68

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan terdiri dari empat bab. Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab *kedua* menjelaskan proses terbentuknya kebijakan pendidikan agama Islam pada masa orde lama (1945-1966). Bab *ketiga*, membahas tentang bentuk kebijakan pendidikan agama islam dan bagaimana implementasinya serta dinamika-dinamika yang terjadi pada masa orde lama (1945-1966). Bab *keempat* merupakan kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari rumusan masalah terhadap kajian tesis ini, penulis dapat menyimpulkan :

1. Selama Orde Lama berlangsung ada 7 bentuk kebijakan mengenai pendidikan agama Islam. (1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945 (2) Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946 (3) UU No 4 Tahun 1950 (4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951 (5) Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951 (6) Undang – undang No. 12 Tahun 1954 dan (7) TAP MPRS No 2 Tahun 1960. Semua kebijakan ini dibuat demi menyalurkan aspirasi masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan pendidikan agama yang dapat diajarkan bagi anak-anak mereka.
2. Ada banyak dinamika yang terjadi pada pendidikan agama Islam pada masa orde lama. Pada masa pasca kemerdekaan (1945-1949) mengupayakan pendidikan agama Islam dapat terselenggara di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren, langgar dan lainnya. selain itu pemerintah juga

mengusahakan pendidikan agama islam juga masuk pada sekolah-sekolah umum serta membenahi fasilitas demi mendukung pendidikan agama Islam. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) pendidikan agama Islam di sekolah umum belum memenuhi harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang menjadikan agama sebagai benteng moral bangsa. Kondisi ini dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh tiga faktor, yaitu: pertama, sumber daya guru agama Islam; kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam; dan ketiga, kegiatan evaluasi dan pengujian terkait pendidikan agama Islam di sekolah umum. Hal ini juga dipengaruhi kondisi pemerintahan yang tidak stabil. Selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin (1960-1966) Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960, dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid dewasa menyatakan keberatan. Pada tahun 1966, kebijakan tersebut dihapus dan menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran yang wajib diberikan di sekolah-sekolah negeri, apalagi swasta, mulai dari SD sampai dengan universitas negeri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis :

1. Sekolah sebaiknya menerapkan undang-undang lokal, yakni undang-undang sekolah yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu. Dalam undang-undang tersebut dapat menyalurkan aspirasi umat muslim di sekolah. Adanya undang-undang tersebut diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan murid dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain di lingkungan sekolah. Aktif mengikuti atau melaksanakan dialog keagamaan atau antar iman dengan peserta dialog adalah murid yang berada di bawah bimbingan gurunya, karena dengan dialog kita bisa mengenal dengan lebih dekat seluk beluk kelompok lain, mengenalnya dengan baik maka akan muncul rasa saling menghargai dan menghormati.
2. Setelah mengkaji mengenai sejarah perkembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat membantu dalam pengkajian kebijakan Pendidikan Agama Islam agar dapat menciptakan kebijakan pendidikan agama Islam yang sesuai dengan aspirasi umat muslim Indonesia

Daftar Pustaka

- Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi “Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. III.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987
- Alam, Wawan Tunggal, *Demi Bangsa, Pertentangan Sukarno Vs Hatta* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Al-Faruqi, Isma'il Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Wahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984
- Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta : Ciputat Press, 1995
- Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Arifin, H.M. *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1991
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Agama Islam Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* Jakarta : Bumi Aksara, 1991
- Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014
- Arifin, Zainul, *Ilmu Pendidikan Islam*, Madiun: STAI Madiun, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-15 Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014
- Ary. H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1995
- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari pra Proklamasi ke Reformasi*, Tesis : Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional*, Jakarta : Kurnia Salam, 2005

- Baharuddin, Ahmad, *Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- Baqir, Zainal Abidin, *Integrasi Ilmu dan Agama Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005
- Barnadib, Sutari Imam, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Daien Indrakusuma, Amir, *Pengantar Ilmu perndidikan*, Malang: Fakultas Ilmu pendidikan IKIP, 1995
- Daulai, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Debdikbud, *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman ke Jaman.*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Departemen Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Dhakidae, Daniel, dkk, *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, Jakarta : Kompas, 2013
- Djaelani, H.A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta: Dermaga 1980
- Djaelani, HA. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung, 1980
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* Jakarta : Grafindo, 2009
- Djoehartono, *Wejangan Revolusi Bung Karno*, Jakarta: Yayasan Penyebar Pancasila, 1965

- Djojonegoro, I. W. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, 1996
- Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1996
- Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1979
- Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV. Ilmu 1979
- Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2010
- Fajar, Malik, *Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren*, dalam Bilik-bilik Pesantren karya Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina, 1997
- Gahril Adian, Donny, *Demokrasi Kami*, Depok : Koekoesan, 2006
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1986
- H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Cet. II
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research* Yogyakarta : Andi Offset, 1990
- Hamalik, Oemar, *Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*, Bandung : PT. Trigenda Karya, 1993
- Hamlan, Andi, *Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Studia Islamika.
- Hasan, Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi* Jakarta : Galia Indonesia, 2002
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 1996

- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Huda, Mitahul, *Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam
- Ikhrom, *Dikhotomi Sistem Pendidikan Islam; Upaya Menangkap Sebab-sebab dan Penyelesaiannya*, dalam buku *Paradigma Pendidikan Islam*, Ismail SM, et.al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Indrajat, Himawan *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1: 53-62
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung : Mizan, 2007
- Jalal, Fasli, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Aditia, 2001
- Jones, Pip *Pengantar teori-teori Sosial : dari teori fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sebagai Usaha peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT. Cemara Indah, 1978
- Kartaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1977
- Kartono, Kartini, *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1997
- Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa : Geanalogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi, 2012
- Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2003
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Mas'ud, Abdrrahman, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Jakarta: Yokyakarta, Gama media, 2002

- Moestoko, Somarsono, *Sejarah Pendidikan dari jaman kejaman*. Jakarta : Balai pustaka, 1986
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, cet ke-2 Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mukodi, *Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Profesi Pendidik, Volume 3, Nomor 2 November 2016
- Muliawan Jasa Ungguh, *Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta : Pustaka, 2005
- Mulkhan, Abdul Munir, *Moral Politik Santri; Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Agama Islam*, Kencana : Jakarta, 2011
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta : Pranada Media, 2003
- Natsir, Mohammad, *Islam Sebagai Ideologi Masjumi*, Jakarta : Aida, 1950, Cet ke-2
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Agama Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1987
- Nugroho, Rianti, *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Nurhayati, *Study History Perkembangan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia*, Skripsi : Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fak : Tarbiyah, 2008
- Poerbakawatja, S. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1970
- Qomar, Mujamil, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, tp: Gelora Aksara Pratama

- Rahim, Husni. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta : Kalam Mulia, 2011
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- Rifa'i, Muhammad, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik, Hingga Modern* Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2011
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Rajawali Press, 2001
- Saidi, H.A. Ridwan *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. Jakarta : CV Rajawali, 1984
- Saleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa : Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Samsuri, *Politik Islam anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, Yogyakarta : Safiria Insani Pers, 2004
- Sanaky, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Agama Islam : Membangun masyarakat madani Indonesia* Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur* Jakarta : Kencana, 2013
- Saridjo, Marwan, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa : Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Ngali Aksara & Pena Madani, 2010
- Sarijo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, CV. Amisco, 1996
- Siahan, Hotman M. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1989
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : INIS, 2004
- Sjamsuddin, Helius, *Sejarah Pendidikan Di Zindonesia zaman kemerdekaan 1945-1950*. Jakarta : Depdikbud. 1993

- Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. I
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurikulum Modern*, Jakarta : LP3ES, 1995
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarata: LP3ES, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 Bandung : Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* Bandung : Alfabeta, 2013
- Sumardi, Muljanto, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Dharma Bakti, 1978
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 Cet. I
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, cet. ke-22 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Syafi'i Maarif, Ahmad, *Peta Bumi Intelektualisme Islam*, Bandung: Mizan, 1994
- Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, Tasikmalaya : Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005
- Uhbiyati, Nur Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Bandung : Pustaka Setia, 1997
- Umasih, *Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan, Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia*, Jurnal, Paramita Vol. 24, No-1
- Undang Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003: UU RI No 20 Tahun 2003
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Beserta Amandemen
- Usman, Hasan *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2007
- Wahyuni, Fitri, *Kurikulum Dari Masa Ke Masa : Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia*, Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2, Juli – Desember 2015
- Wirawan, I.B *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup

Yamin, Moh. *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta : Ar Ruz, 2009

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Hidayakarya Agung, 1979

Zurinal, *Ilmu Pendidikan, Pengantar dan Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Hasan Baidlawie
Tempat, Tgl Lahir : Bandar Lampung, 5 Mei 1994
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Wiyoro lor, Yogyakarta
Telepon : 0822 7697 5356
Email : BarkerHasan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Al-Azhar 2006
2. SMP N 19 Bandar Lampung 2009
3. SMA N 1 Natar Lampung Selatan 2012
4. IAIN Raden Intan Lampung (S1) 2016
5. Uin Sunan Kalijaga (S2) 2018

C. Karya Ilmiah

1. Skripsi, Pengaruh Latar Belakang Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 Natar
2. Jurnal, pendidik dalam perspektif pendidikan islam
3. Tesis, perkembangan pendidikan agama islam masa orde lama (kajian kebijakan pendidikan agama islam tahun 1945-1966)